KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- 450 /PB/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-157/PB/2015
TENTANG PEMUTAKHIRAN KODEFIKASI SEGMEN AKUN
PADA BAGAN AKUN STANDAR

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan/penetapan kebijakan akun baru pada segmen akun dipandang perlu dilakukan pemutakhiran dengan menambah/mengubah kodefikasi segmen akun dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-157/PB/2015 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-431/PB/2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-157/PB/2015 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

2. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-157/PB/2015 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-431/PB/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-157/PB/2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN KODEFIKASI SEGMEN AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 157/PB/2015 tentang Pemutakhiran

Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar dengan menambah/mengubah uraian Segmen Akun Kas dan Penjelasan atas Penambahan/Perubahan Uraian Segmen Akun Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, serta menambah/mengubah uraian Segmen Akun Akrual dan Penjelasan atas Penambahan/Perubahan Uraian Segmen Akun Akrual sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri/Pimpinan Lembaga;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- 450 /PB/2015 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-157/PB/2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN KODEFIKASI SEGMEN AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR

PENAMBAHAN/PERUBAHAN SEGMEN AKUN KAS

A. PENAMBAHAN SEGMEN AKUN KAS

1. PENAMBAHAN AKUN ASET

Akun Aset

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
111	ASET	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
1118	Kas Lainnya dan Setara Kas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
11182	Kas Lainnya Pada Kementerian Negara/Lembaga	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
111826	Kas Lainnya di BLU	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru
111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru

2. PENAMBAHAN AKUN EKUITAS

Akun Ekuitas

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
311	EKUITAS	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
3117	Keuntungan/Kerugian yang Belum Terealisasi	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
31171	Selisih Kurs	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
311711	Selisih Kurs	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
3119	Ekuitas Dana Lancar Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
31191	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
311911	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

3. PENAMBAHAN AKUN PENDAPATAN

Akun Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
423	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
4232	Pendapatan Jasa	Kode Akun dan Uraian Akun Lama

42327	Pendapatan Jasa III	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru
423272	Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
423273	Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
423274	Pendapatan dari penggunaan spectrum dan frekuensi radio	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
4239	Pendapatan Lain-lain	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
42396	Pendapatan Lain-Lain I	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru
423962	Pendapatan dari Retur SP2D	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
423963	Pendapatan Surplus Pungutan Otoritas Jasa Keuangan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

4. PENAMBAHAN AKUN BELANJA

a. Akun Belanja Subsidi Perusahaan Swasta

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
552	BELANJA SUBSIDI PERUSAHAAN SWASTA	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
5521	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
55211	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
552112	Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

b. Akun Belanja Lain-Lain

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
581	BELANJA LAIN-LAIN	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
5814	Belanja Lain-lain BUN	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
58141	Belanja Lain-lain BUN	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
581411	Belanja Iuran ke Lembaga Internasional	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

5. PENAMBAHAN AKUN PEMBIAYAAN

a. Akun Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
717	PENERIMAAN CICILAN POKOK INVESTASI PEMERINTAH	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
7173	Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
71731	Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
717311	Penerimaan Kembali Modal Awal Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

b. Akun Penyertaan Modal Negara

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
724	PENYERTAAN MODAL NEGARA	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
7249	Penyertaan Modal Negara Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
72491	Penyertaan Modal Negara Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
724913	Penyertaan Modal Negara ke Bank Indonesia	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

c. Akun Pengeluaran Investasi Pemerintah

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
727	PENGELUARAN INVESTASI PEMERINTAH	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
7271	Investasi Pemerintah	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
72713	Pengeluaran Pembiayaan untuk Manajemen Aset Negara	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
727131	Pengeluaran Pembiayaan untuk Modal Awal Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

d. Akun Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
817	PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
8173	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama

81731	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
817318	Penerimaan Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

e. Akun Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
817	PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
8173	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
81732	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
817321	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Minyak Bumi	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
817322	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Gas Bumi	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
817323	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Migas Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
817324	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Minyak Bumi	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
817325	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Gas Bumi	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
817326	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PBB Minyak Bumi	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
817327	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPN Dalam Negeri	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
817328	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Pasal 23	Kode Akundan Uraian Akun Baru

f. Akun Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
827	PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
8273	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
82731	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
827318	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara	Kode Akundan Uraian Akun Baru

g. Akun Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
827	PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
8273	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
82732	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
827327	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPN Dalam Negeri	Kode Akundan Uraian Akun Baru
827328	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Pasal 23	Kode Akundan Uraian Akun Baru

B. PERUBAHAN SEGMEN AKUN KAS

1. PERUBAHAN AKUN KAS

Akun Kas Dan Setara Kas

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
111	KAS DAN SETARA KAS	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
1113	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
11131	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
111312	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dalam Valuta Asing	Kode AkunLama dan Uraian Akun Baru

2. PERUBAHAN AKUN PENDAPATAN

Akun Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
423	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423116	Pendapatan Dari Hasil Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan, Hasil Cetakan dan Informasi Lainnya	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru

4232	PendapatanJasa	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
42321	Pendapatan Jasa I	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, dan Paspor	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423215	Pendapatan Sensor, Karantina, Pengawasan, Pemeriksaan	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/ Lembaga	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
42322	Pendapatan Jasa II	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Jasa Penyelenggaraan Penyiaran	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru
42399	Pendapatan Lain-Lain II	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- 450 /PB/2015 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-157/PB/2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN KODEFIKASI SEGMEN AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR

PENJELASAN ATAS PENAMBAHAN/PERUBAHAN URAIAN SEGMEN AKUN KAS PADA BAGAN AKUN STANDAR

AKUN	PENJELASAN
PENAMBAHAN SEGMEN AKUN KAS	
111826	Kas Lainnya di BLU
	Digunakan untuk mencatat Kas BLU yang belum disahkan
111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Kas di K/L dari hibah langsung bentuk uang yang belum disahkan
311711	Selisih Kurs
	Digunakan untuk mencatat Selisih Kurs belum terealisasi sebelum direklas menjadi akun pendapatan LO/Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
311911	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
	Digunakan untuk mencatat Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
423272	Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Digunakan pada Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan/TNI (012), POLRI (060), Kemenpora (092), dan Kemenkes (024).
423273	Pendapatan yang berasaldari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari klaim BPJS Kesehatan pada Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL). Digunakan pada Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan/TNI (012), POLRI (060), Kemenpora (092), dan Kemenkes (024).
423274	Pendapatan dari penggunaan spectrum dan frekuensi radio
	Digunakan untuk mencatat PNBP yang berasal dari penggunaan spektrum dan frekuensi radio pada Kementerian Kominfo (BA 059)
423962	Pendapatan dari Retur SP2D
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Retur SP2D yang disetorkan ke kas negara. Dibukukan pada BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus)
423963	Pendapatan Surplus Pungutan Otoritas Jasa Keuangan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Surplus Pungutan Otoritas Jasa Keuangan
552112	Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bantuan uang muka yang harus dibayar oleh Pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap penyaluran bantuan uang muka perumahan.
581411	Belanja Iuran ke Lembaga Internasional
	Digunakan untuk mencatat Iuran Pemerintah ke Lembaga Internasional

AKUN	PENJELASAN
717311	Penerimaan Kembali Modal Awal Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara
	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali modal awal pembentukan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara.
724913	Penyertaan Modal Negara ke Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan dalam rangka penyertaan modal negara pada Bank Indonesia
727131	Pengeluaran Pembiayaan untuk Modal Awal Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan investasi pemerintah dalam rangka pembentukan BLU LMAN sebagai modal awal.
817318	Penerimaan Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
817321	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Minyak Bumi
817322	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Gas Bumi
817323	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Migas Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Migas Lainnya
817324	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Minyak Bumi
817325	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Gas Bumi
817326	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PBB Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PBB Minyak Bumi
817327	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPN Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan non anggaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPN Dalam Negeri
817328	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Pasal 23
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan non anggaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Pasal 23

AKUN	PENJELASAN
827318	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan non anggaran Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
827327	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPN Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran non anggaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPN Dalam Negeri
827328	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Pasal 23
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran non anggaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Pasal 23
PERUBAHAN SEGMEN AKUN KAS	
111312	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dalam Valuta Asing
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan
	Penerimaan dari penjualan hasil sitaan baik berupa uang maupun hasil penjualan barang rampasan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan Agung (BA 006), Kementerian Hukum dan HAM (013), Kepolisian RI (060), Kementerian Hukum dan HAM (013), Kepolisian RI (060), dan Kementerian Keuangan (015).
423116	Pendapatan Dari Hasil Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan, Hasil Cetakan dan Informasi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dari Hasil Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan, Hasil Cetakan dan Informasi Lainnya yang berada di berbagai Kementerian Negara/Lembaga
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, dan Paspor
	Pendapatan dari pelayanan pembuatan Surat Keterangan, antara lain Visa dan Paspor oleh Kementerian Luar Negeri (BA 011), pendapatan dari surat keterangan keimigrasian antara lain KITAS, izin tinggal tetap di Indonesia dari Kementerian Hukum dan HAM (BA 013), Surat Keterangan Asal (SKA) dari Kementerian Perdagangan (BA 090), Surat Keterangan Bebas Tanggungan Berperkara dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (BA 108).
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan
	Pendapatan dari permintaan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Kementerian Hukum dan HAM (BA 013), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil penelitian dan pembuatan label obat-obatan pertanian/peternakan di Kementerian Pertanian (BA 018), wajib daftar perusahaan, pengujian mutu barang dan sertifikasi mutu barang di Kementerian Perindustrian (BA 019) dan/atau Kementerian Perdagangan (BA 090), penyelenggaraan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk, penyelenggaraan pos, dan pengelolaan nama domain Indonesia di Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059), hak dan perijinan Kementerian Tenaga Kerja (BA 026), hak dan perijinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032), hasil lelang 3G (postel), termasuk pendapatan perijinan, dan persetujuan akuntan publik pada Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Setjen Kementerian Keuangan (BA 015).

AKUN	PENJELASAN
423215	Pendapatan Sensor, Karantina, Pengawasan, Pemeriksaan
	Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai kementerian antara lain Kementerian Pertanian (BA 018), Kementerian Perindustrian (BA 019) , Kementerian Perdagangan (BA 090), Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023), Kementerian Kesehatan (BA 024), Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (BA 040), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (042).
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/ Lembaga
	Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, sertifikasi, pelatihan dan teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Jasa Penyelenggaraan Penyiaran
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari jasa penyelenggaraan telekomunikasi dan jasa penyelenggaraan penyiaran pada Kementerian Komunikasi dan Informasi (BA 059)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

DIREKTUR JENDERAL

MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- 450 /PB/2015 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-157/PB/2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN KODEFIKASI SEGMEN AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR

PENAMBAHAN/PERUBAHAN URAIAN SEGMEN AKUN AKRUAL

A. PENAMBAHAN SEGMEN AKUN AKRUAL

1. PENAMBAHAN AKUN ASET

a. Akun Aset

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
111	ASET	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
1118	Kas Lainnya dan Setara Kas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
11182	Kas Lainnya Pada Kementerian Negara/Lembaga	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
111826	Kas Lainnya di BLU	Kode Akundan Uraian Akun Baru
111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

b. Akun Piutang

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
115	PIUTANG	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
1152	Piutang Bukan Pajak	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
11523	Piutang Transfer ke Daerah	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
115239	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

2. PENAMBAHAN AKUN KEWAJIBAN

a. Akun Utang kepada Pihak Ketiga

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
212	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
2121	Utang kepada Pihak Ketiga	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
21219	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
212193	Dana Pihak Ketiga BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

b. Akun Utang Yang Belum Ditagihkan

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
218	UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
2182	Hibah Langsung yang Belum Disahkan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
21821	Hibah Langsung yang Belum Disahkan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
218211	Hibah Langsung yang Belum Disahkan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

c. Akun Utang Jangka Pendek Lainnya

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
219	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
2199	Utang Jangka Pendek Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
21996	Utang Bendahara	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
219964	Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

3. PENAMBAHAN AKUN EKUITAS

a. Akun Ekuitas

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
311	EKUITAS	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
3117	Keuntungan/Kerugian yang Belum Terealisasi	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
31171	SelisihKurs	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
311711	SelisihKurs	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
3119	Ekuitas Dana Lancar Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
31191	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
311911	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

b. Akun Ekuitas

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
391	EKUITAS	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
3911	Ekuitas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
39111	Ekuitas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
391117	Penyesuaian Nilai Persediaan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
391119	Koreksi Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
39112	Ekuitas Transaksi Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
391121	Ekuitas Transaksi Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
391122	Ekuitas Badan Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
39113	Ekuitas Pengesahan Hibah	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
391131	Pengesahan Hibah Langsung	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

4. PENAMBAHAN AKUN PENDAPATAN

a. Akun Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
423	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
4232	PendapatanJasa	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
42327	Pendapatan Jasa III	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru
423272	Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
423273	Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
423274	Pendapatan dari penggunaan spectrum dan frekuensi radio	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

4239	Pendapatan Lain-lain	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
42396	Pendapatan Lain-Lain I	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru
423962	Pendapatan dari Retur SP2D	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
423963	Pendapatan Surplus Pungutan Otoritas Jasa Keuangan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

b. Akun Pendapatan Badan Layanan Umum

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
4244	Pendapatan dari Alokasi APBN	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
42441	Pendapatan dari Alokasi APBN	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

c. Akun Pendapatan Penyesuaian Akrual

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
491	PENDAPATAN PENYESUAIAN AKRUAL	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
4914	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
49142	Pendapatan Perolehan Aset	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

5. PENAMBAHAN AKUN BEBAN

a. Akun Beban Subsidi Perusahaan Swasta

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
545	BEBAN PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DALAM NEGERI	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
5451	Beban Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
54515	Beban Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek Valas	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

545151	Beban Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek Valas	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
545159	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Disocunt SBSN Jangka Pendek Valas	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

b. Akun Beban Subsidi Perusahaan Swasta

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
552	BEBAN SUBSIDI PERUSAHAAN SWASTA	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
5521	Beban Subsidi Lembaga Keuangan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
55211	Beban Subsidi Lembaga Keuangan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
552112	Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

c. Akun Beban Lain-lain

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
581	BEBAN LAIN-LAIN	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
5814	Beban Lain-lain BUN	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
58141	Beban Lain-lain BUN	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
581411	Beban Iuran ke Lembaga Internasional	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

d. Akun Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
594	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
5949	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
59491	Beban Penyisihan Piutang Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
594911	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
59492	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

594921	Beban Penyisihan PiutangTidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
59493	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
59494	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
594941	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
59495	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
594951	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
594952	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Aset Lainnya RDI	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
594953	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Aset Lainnya Kredit Program	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
59496	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Kredit Pemerintah	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
594961	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Kredit Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
594962	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Kredit Investasi Pemerintah	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
594963	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Penjaminan Pemerintah	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
59499	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

e. Akun Beban Reklasifikasi Aset

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
595	BEBAN REKLASIFIKASI ASET	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
5951	Beban Aset Ekstrakomtabel	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
59512	Beban Aset Ekstrakomtabel - BLU	Kode Akun dan Uraian

		Akun Baru
595121	Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah - BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
595122	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin– BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
595123	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan - BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
595124	Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
595125	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya– BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
595126	Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan – BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
595127	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud– BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

f. Akun Kerugian Pelepasan Aset Dan Kerugian Belum Terealisasi

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
596	KERUGIAN PELEPASAN ASET DAN KERUGIAN BELUM TEREALISASI	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
5961	Beban Pelepasan Aset	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
59612	Beban Persediaan Rusak/Usang	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

B. PERUBAHAN SEGMEN AKUN AKRUAL

1. PERUBAHAN AKUN KAS

Akun Kas Dan Setara Kas

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
111	KAS DAN SETARA KAS	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
1113	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
11131	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
111312	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dalam Valuta Asing	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru

2. PERUBAHAN AKUN KEWAJIBAN

Akun Utang kepada Pihak Ketiga

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
212	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
2121	Utang kepada Pihak Ketiga	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
21215	Utang Pihak Ketiga Migas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
212158	Utang Pihak Ketiga Migas Transito	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
212159	Utang Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara.	Kode Akun dan Uraian Akun Baru

3. PERUBAHAN AKUN EKUITAS

Akun Utang kepada Pihak Ketiga

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
391	EKUITAS	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
3911	Ekuitas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
39111	Ekuitas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap/ Aset Lainnya Non Revaluasi	Kode Akun dan Uraian Akun Lama

4. PERUBAHAN AKUN PENDAPATAN

Akun Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
423	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423116	Pendapatan Dari Hasil Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan, Hasil Cetakan dan Informasi Lainnya	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru

4232	PendapatanJasa	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
42321	PendapatanJasa I	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, dan Paspor	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423215	Pendapatan Sensor, Karantina, Pengawasan, Pemeriksaan	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/ Lembaga	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
42322	Pendapatan Jasa II	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Jasa Penyelenggaraan Penyiaran	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru
42399	Pendapatan Lain-Lain II	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- 450 /PB/2015 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-157/PB/2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN KODEFIKASI SEGMEN AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR

PENJELASAN ATAS PENAMBAHAN/PERUBAHAN URAIAN SEGMEN AKUN AKRUAL PADA BAGAN AKUN STANDAR

AKUN	PENJELASAN
111826	Kas Lainnya di BLU
	Digunakan untuk mencatat Kas BLU yang belum disahkan
111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya di K/L yang berasal dari Hibah langsung bentuk uang yang Belum Disahkan
115239	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lainnya
212193	Dana Pihak Ketiga BLU
	Digunakan untuk mencatat Dana Pihak Ketiga BLU
218211	Hibah Langsung yang Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatatHibah Langsung yang Belum Disahkan
219964	Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor
	Digunakan untuk mencatat Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor
311711	Selisih Kurs
	Digunakan untuk mencatat Selisih Kurs belum terealisasi sebelum direklas menjadi akun pendapatan LO/Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
311911	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
	Digunakan untuk mencatat Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
391117	Penyesuaian Nilai Persediaan
	Digunakan untuk mencatat Penyesuaian Nilai Persediaan
391119	Koreksi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Koreksi Lainnya
391121	Ekuitas Transaksi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Ekuitas Transaksi Lainnya
391122	Ekuitas Badan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Ekuitas Badan Lainnya
391131	Pengesahan Hibah Langsung
	Digunakan untuk mencatat Pengesahan Hibah Langsung
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
	Digunakan untuk mencatat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
423272	Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Digunakan pada Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan/TNI (012), POLRI (060), Kemenpora (092), dan Kemenkes (024).
423273	Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari klaim BPJS Kesehatan pada Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL). Digunakan pada Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan/TNI (012), POLRI (060), Kemenpora (092), dan Kemenkes (024).
423274	Pendapatan dari penggunaan spektrum dan frekuensi radio

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat PNBP yang berasal dari penggunaan spektrum dan frekuensi radio pada Kementerian Kominfo (BA 059)
423962	Pendapatan dari Retur SP2D
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Retur SP2D yang disetorkan ke kas negara. Dibukukan pada BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus)
423963	Pendapatan Surplus Pungutan Otoritas Jasa Keuangan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Surplus Pungutan Otoritas Jasa Keuangan
424411	Pendapatan dari Alokasi APBN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU yang berasal dari DIPA sumber dana Rupiah Murni (RM), yang akan dieliminasi dalam proses konsolidasi LKKL
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Perolehan Aset Lainnya
545151	Beban Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek Valas
	Digunakan untuk mencatat Beban Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek Valas
545159	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Disocunt SBSN Jangka Pendek Valas
	Digunakan untuk mencatat Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Disocunt SBSN Jangka Pendek Valas
552112	Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bantuan uang muka yang harus dibayar oleh Pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap penyaluran bantuan uang muka perumahan.
581411	Beban Iuran ke Lembaga Internasional
	Digunakan untuk mencatat Beban Iuran ke Lembaga Internasional
594911	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran
594921	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran BLU
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
	Digunakan untuk mencatatBeban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
594941	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
	Digunakan untuk mencatatBeban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
594951	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman
594952	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Aset Lainnya RDI
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Aset Lainnya RDI

AKUN	PENJELASAN
594953	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Aset Lainnya Kredit Program
	Digunakan untuk mencatatBeban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Aset Lainnya Kredit Program
594961	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Kredit Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Kredit Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan
594962	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Kredit Investasi Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Kredit Investasi Pemerintah
594963	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Penjaminan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatatBeban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Penjaminan Pemerintah
594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya
595121	Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah - BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah - BLU
595122	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU
595123	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan - BLU
595124	Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
595125	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya - BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya - BLU
595126	Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan – BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan – BLU
595127	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud - BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud - BLU
596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang
	Digunakan untuk mencatat Kerugian Persediaan Rusak/Usang
	PERUBAHAN
111312	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dalam Valuta Asing
212158	Utang Pihak Ketiga Migas Transito

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat utang pihak ketiga migas transito, korolari dari reklasifikasi penerimaan transito penerimaan ditangguhkan ke pendapatan migas transito
212159	Utang Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara.
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi
	Digunakan untuk mencatat Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan
	Penerimaan dari penjualan hasil sitaan baik berupa uang maupun hasil penjualan barang rampasan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan Agung (BA 006), Kementerian Hukum dan HAM (013), Kepolisian RI (060), Kementerian Hukum dan HAM (013), Kepolisian RI (060), dan Kementerian Keuangan (015).
423116	Pendapatan Dari Hasil Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan, Hasil Cetakan dan Informasi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dari Hasil Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan, Hasil Cetakan dan Informasi Lainnya yang berada di berbagai Kementerian Negara/Lembaga
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, dan Paspor
	Pendapatan dari pelayanan pembuatan Surat Keterangan, antara lain Visa dan Paspor oleh Kementerian Luar Negeri (BA 011), pendapatan dari surat keterangan keimigrasian antara lain KITAS, izin tinggal tetap di Indonesia dari Kementerian Hukum dan HAM (BA 013), Surat Keterangan Asal (SKA) dari Kementerian Perdagangan (BA 090), Surat Keterangan Bebas Tanggungan Berperkara dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (BA 108).
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan
	Pendapatan dari permintaan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Kementerian Hukum dan HAM (BA 013), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil penelitian dan pembuatan label obat-obatan pertanian/peternakan di Kementerian Pertanian (BA 018), wajib daftar perusahaan, pengujian mutu barang dan sertifikasi mutu barang di Kementerian Perindustrian (BA 019) dan/atau Kementerian Perdagangan (BA 090), penyelenggaraan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk, penyelenggaraan pos, dan pengelolaan nama domain Indonesia di Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059), hak dan perijinan Kementerian Tenaga Kerja (BA 026), hak dan perijinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032), hasil lelang 3G (postel), termasuk pendapatan perijinan, dan persetujuan akuntan publik pada Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Setjen Kementerian Keuangan (BA 015).
423215	Pendapatan Sensor, Karantina, Pengawasan, Pemeriksaan
	Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai kementerian antara lain Kementerian Pertanian (BA 018), Kementerian Perindustrian (BA 019) , Kementerian Perdagangan (BA 090), Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023), Kementerian Kesehatan (BA 024), Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (BA 040), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (042).
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/ Lembaga
	Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, sertifikasi, pelatihan dan teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

AKUN	PENJELASAN
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Jasa Penyelenggaraan Penyiaran
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari jasa penyelenggaraan telekomunikasi dan jasa penyelenggaraan penyiaran pada Kementerian Komunikasi dan Informasi (BA 059)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

DIREKTUR JENDERAL

MARWANTO HARJOWIRYONO